



Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agama Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan

Julfan Piliang^{1*}, Neni Vesna Madjid²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: julfanpiliang3@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/01/2025

Diterima, 09/02/2025

Dipublikasi, 17/01/2025

Kata Kunci:

Patroli Dialogis,
Pencegahan, Kejahatan

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Agam dilakukan dengan mendengarkan langsung keluhan dan masalah yang dihadapi warga, seperti ketidakamanan, kemacetan, atau konflik antarwarga. Polisi mencari solusi yang tepat bersama masyarakat. Keterlibatan aktif dalam dialog, masyarakat akan merasa bahwa kepolisian bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberi layanan. Setiap keluhan yang diterima dicatat dan dianalisis lebih lanjut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan yang diperlukan. Informasi ini juga bisa digunakan sebagai bahan dalam melakukan patroli berikutnya atau sebagai laporan untuk pemerintah daerah jika perlu ada kebijakan tambahan. Patroli dialogis oleh Polres Agam, adalah pendekatan preventif dan proaktif yang berfokus pada interaksi langsung antara polisi dan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Agam dapat diukur dengan indikator seberapa besar dukungan dari masyarakat, yaitu apakah masyarakat mempercayai aparat keamanan, merasa nyaman dalam berinteraksi dengan mereka, dan mau berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Berdasarkan data dari Polres Agam, setelah intensifikasi patroli dialogis di beberapa wilayah rawan, terjadi penurunan signifikan dalam jenis tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan, perkelahian antar pemuda, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi secara reguler dan komunikasi yang baik dengan warga membantu mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Patroli dialogis berhasil memperbaiki hubungan antara masyarakat dan polisi. Di Kabupaten Agam, patroli ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika warga merasa lebih nyaman untuk melapor dan berdialog dengan polisi, mereka lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait potensi ancaman atau kejahatan di sekitar mereka.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of dialogic patrols in an effort to prevent criminal acts in the Agam Regency Jurisdiction is carried out by listening directly to complaints and problems faced by residents, such as insecurity, traffic jams, or conflicts between residents. The police seek the right solution together with the community. Active involvement in dialogue, the community will feel that the police are not only law enforcement officers, but also protectors and service providers. Every complaint received is recorded and analyzed further to be used as a basis for taking the necessary actions. This information can also be used as material in conducting the next patrol or as a report to the local government if additional policies are needed. Dialogic patrols by the Agam Police are a preventive and proactive approach that focuses on direct interaction between the police and the community. The effectiveness of the implementation of dialogic patrols in an

Keywords:

Dialogic Patrol,
prevention, Crime

effort to prevent criminal acts in the Agam Regency Jurisdiction can be measured by indicators of how much support there is from the community, namely whether the community trusts the security forces, feels comfortable interacting with them, and is willing to participate in maintaining environmental security. Based on data from the Agam Police, after the intensification of dialogic patrols in several vulnerable areas, there was a significant decrease in types of crimes such as violent theft, fights between youths, and drug abuse. This shows that regular police presence and good communication with residents help prevent potential crimes before they occur. Dialogic patrols have succeeded in improving relations between the community and the police. In Agam Regency, these patrols have increased public trust in law enforcement. When residents feel more comfortable reporting and having a dialogue with the police, they are more proactive in providing information regarding potential threats or crimes around them.

PENDAHULUAN

Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.¹ Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.² Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara³

Tindak pidana dimana kejahatan selalu saja selangkah lebih depan, dengan maraknya teknologi dan perkembangan informasi tindak pidana semakin bervariasi, ada beberapa manusia yang bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi namun juga ada beberapa yang justru memanfaatkan perkembangan itu untuk melakukan tindak kejahatan baik dari kejahatan yang lingkupnya kecil sampai lintas negara atau bahkan kejahatan di dunia digital dan kejahatan kerah putih.⁴ Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dua tugas utama antara lain yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke pengadilan.⁶

Sesuai dengan sifat patroli yaitu deteksi, preventif, dan represif sehingga patroli polisi juga berfungsi untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat disuatu daerah yang bilamana suatu hari

¹ Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016, hlm 136.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 11.

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 16-17.

⁴ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 27.

⁵ H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 69.

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Latsbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 59.

ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut.⁷ Upaya patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan terciptanya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut serta kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peran aktif masyarakat juga dibutuhkan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat tersebut. Polri selalu menekankan Fungsi Preventif khususnya patroli kepolisian disuatu daerah untuk menekan angka kejahatan dan meredam kejahatan tak terkecuali di Kabupaten Agam.

Hal ini menjadi tantangan bagi kepolisian dalam meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai bentuk dari kegiatan patroli dialogis. Persoalan komunikasi yang paling menjadi perhatian adalah bagaimana komunikasi yang kita lakukan bisa efektif terhadap orang lain. Itu dapat berarti mencari dukungan, membina hubungan, mempengaruhi orang lain agar mau melakukan apa yang kita inginkan, menetapkan keputusan, meminta anggota masyarakat untuk melakukan program pemerintah, dan berbagai hubungan profesional lainnya.⁸

Pelaksanaan patroli dialogis ini tentunya membutuhkan persyaratan kemampuan antara lain kemampuan komunikasi yang baik serta pengetahuan tentang karakteristik kerawanan wilayah penugasan oleh para personel/petugas pelaksana patroli. Patroli dilaksanakan pada tempat yang rawan tindak pidana terutama pada malam hari. Hal ini dimaksudkan agar personel patroli mampu berinteraksi dengan baik kepada masyarakat sehingga target untuk mencegah atau mengantisipasi tindak kejahatan jalanan maupun kejahatan di lingkungan dapat tercapai dengan baik.⁹

Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan patroli dialogis oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan dan efektivitasnya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Patroli Dialogis Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kabupaten Agam

Tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Agam pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti pada kasus pencurian dan narkoba. Pada tahun 2021, Pencurian dengan Kekerasan sebanyak 25 kasus, Kejahatan ini melibatkan pencurian yang disertai dengan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik terhadap korban. Dari 25 kasus yang dilaporkan, sebanyak 18 kasus berhasil diselesaikan dengan persentase penyelesaian sebanyak 72% penyelesaian. Tindak Pidana Narkoba sebanyak 45 kasus. Tingkat penyelesaian untuk kasus narkoba sangat tinggi, yaitu 89% (40 dari 45 kasus diselesaikan). Penganiayaan sebanyak 32 kasus. Sebanyak 28 dari 32 kasus berhasil diselesaikan (88% penyelesaian). Perdagangan Orang sebanyak 5 kasus. Dari 5 kasus yang dilaporkan, 4 kasus berhasil diselesaikan, menunjukkan tingkat penyelesaian sebesar 80%.

Pada tahun 2022, kasus-kasus tindak pidana di wilayah Polres Agam mengalami peningkatan, Pencurian Kendaraan Bermotor sebanyak 50 kasus. Sebanyak 40 dari 50 kasus berhasil diselesaikan (80% penyelesaian). Tindak Pidana Narkoba sebanyak 60 kasus. Tingkat penyelesaian mencapai 92%, dengan 55 kasus berhasil ditangani. Penipuan sebanyak

⁷ *Ibid*, hlm 98.

⁸ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm 79.

⁹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm 37.

28 kasus. Dari 28 kasus yang dilaporkan, 20 kasus berhasil diselesaikan (71% penyelesaian). Perjudian sebanyak 12 kasus. Tingkat penyelesaian cukup tinggi, yakni 92% (11 dari 12 kasus).

Pada tahun 2023, Polres Agam terus berupaya memberantas tindak pidana di wilayah hukumnya, dengan beberapa jenis kejahatan mengalami peningkatan, terutama penggelapan dan kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2023. Sebanyak 25 dari 30 kasus berhasil diselesaikan (83% penyelesaian). Tindak Pidana Narkotika sebanyak 55 kasus. Tingkat penyelesaian tetap tinggi (91%), dengan 50 dari 55 kasus berhasil diselesaikan. Penggelapan sebanyak 15 kasus. Sebanyak 12 dari 15 kasus berhasil diselesaikan (80% penyelesaian). Kekerasan Terhadap Perempuan sebanyak 20 kasus. Sebanyak 16 dari 20 kasus berhasil diselesaikan (80%), dengan fokus pada pendampingan korban dan proses hukum yang lebih cepat bagi pelaku kekerasan domestik.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Polres Agam telah bekerja keras dalam menangani berbagai tindak pidana di wilayah hukumnya, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, pencurian, dan penganiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut yakni melalui patroli dialogis oleh Polres Agam. Patroli dialogis oleh Polres Agam, adalah pendekatan preventif dan proaktif yang berfokus pada interaksi langsung antara polisi dan masyarakat. Dengan metode ini, polisi bisa mencegah kejahatan, mengumpulkan informasi, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi warga dengan cepat. Selain itu, patroli dialogis juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan memperkuat rasa aman di lingkungan. Dengan dialog terbuka, masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sementara polisi bisa lebih efektif dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan.

Patroli dialogis merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat melalui interaksi langsung dan persuasif. Polres Agam, melalui Sat samapta, menjalankan patroli dialogis sebagai upaya untuk mendekati diri dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa aman. Patroli Dialogis yang telah dilakukan oleh Sat samapta Polres Agam yakni yang dilakukan di Pasar Padang Luar, Lubuk Basung, pada tahun 2021 dan 2023 dilakukan sebanyak 4 kali perbulan. Patroli di pasar Padang Luar pada tahun ini terutama menyoroti masalah pencurian dan premanisme di sekitar pasar. Banyak pedagang mengeluhkan barang dagangan yang sering hilang, terutama pada malam hari, serta adanya intimidasi oleh kelompok-kelompok preman. Polres Agam merespons dengan melakukan penertiban preman di area pasar, meningkatkan patroli malam hari, serta menempatkan lebih banyak personel untuk berjaga selama jam-jam sibuk di pasar. Pengawasan yang lebih ketat berhasil mengurangi insiden pencurian di pasar tersebut.

Kemudian patrol dialogis dilakukan di Pasar Maninjau pada tahun 2021, patrol dilakukan sebanyak 3 kali perbulan. Masalah utama di Pasar Maninjau adalah ketertiban lalu lintas dan parkir liar yang menyebabkan kemacetan, terutama saat hari pasar. Pedagang sering menggunakan jalan utama sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Polres Agam melakukan penertiban pedagang yang menggunakan jalan raya dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur area parkir dan penempatan rambu-rambu lalu lintas baru. Penertiban ini membantu mengurangi kemacetan di hari pasar besar.

Kemudian patroli dialogis dilakukan di Simpang manggopoh pada tahun 2021 yakni sebanyak 2 kali perbulan. Patroli di area Simpang Manggopoh berfokus pada keselamatan lalu lintas di sekitar sekolah. Warga mengeluhkan pelanggaran lalu lintas, seperti kendaraan yang melaju kencang di depan sekolah, yang membahayakan siswa. Polres Agam menindaklanjuti keluhan ini dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di area sekolah serta menempatkan petugas pada jam-jam tertentu untuk mengawasi arus lalu lintas di sekitar sekolah. Hasil ini membantu meningkatkan keselamatan bagi siswa dan pengguna jalan.

Patroli dialogis dilakukan di Jalan Ahmad Yani, Lubuk Basung pada tahun 2022, sebanyak 5 kali perbulan. Di Jalan Ahmad Yani, isu utama yang dibahas selama patroli dialogis adalah pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilaporkan meningkat pada tahun 2022. Lokasi ini sering menjadi tempat parkir kendaraan tanpa pengawasan yang memadai. Untuk menekan angka pencurian kendaraan, Polres Agam bekerja sama dengan masyarakat dan pemilik usaha di sekitar untuk memasang CCTV di titik-titik strategis serta melakukan razia kendaraan secara berkala. Langkah ini cukup efektif dalam mengurangi insiden pencurian kendaraan di lokasi tersebut.

Patroli dialogis dilakukan di Pasar Bawan, Ampek Nagari pada tahun 2022 yakni sebanyak 3 kali perbulan. Pasar Bawan menghadapi masalah penataan pedagang yang kurang teratur dan banyak pedagang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Selain itu, kasus pencurian kecil juga kerap dilaporkan oleh pedagang dan pengunjung pasar. Polres Agam melakukan penertiban pedagang liar yang menggunakan trotoar tanpa izin, serta meningkatkan patroli di area pasar untuk mencegah pencurian. Tindakan ini membantu memperbaiki ketertiban dan keamanan di Pasar Bawan.

Patroli dialogis dilakukan di Tiku Selatan pada tahun 2022, yakni sebanyak 2 kali perbulan. Di wilayah pesisir ini, patroli dialogis berfokus pada keamanan nelayan dan pencurian hasil laut. Nelayan sering melaporkan pencurian ikan atau hasil tangkapan di malam hari serta kekhawatiran terkait keselamatan saat melaut. Polres Agam menindaklanjuti keluhan ini dengan meningkatkan patroli malam di sepanjang pantai dan area pelabuhan kecil untuk melindungi nelayan dari kejahatan yang mungkin terjadi di laut. Peningkatan patroli ini membantu menurunkan angka pencurian di wilayah tersebut.

Patroli dialogis dilakukan di Lubuk Basung (Pusat Kota) pada tahun 2022, yakni sebanyak 6 kali perbulan. Di pusat kota Lubuk Basung, salah satu masalah utama adalah balapan liar yang sering terjadi di malam hari, terutama di jalan-jalan yang sepi. Warga mengeluhkan kebisingan dan bahaya yang ditimbulkan oleh aksi balap liar ini. Polres Agam melakukan razia kendaraan secara berkala dan menyita kendaraan yang terlibat dalam balapan liar. Tindakan tegas ini berhasil mengurangi aktivitas balapan liar dan meningkatkan ketertiban di malam hari.

Patroli dialogis dilakukan di Jalan Raya Bukittinggi-Lubuk Basung pada tahun 2023, yakni dilakukan sebanyak 5 kali perbulan. Patroli di sepanjang jalan utama ini menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran pengguna sepeda motor, terutama pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau tidak menggunakan helm. Sebagai tindak lanjut, Polres Agam bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menambah rambu lalu lintas di titik-titik rawan kecelakaan dan melakukan sosialisasi keselamatan berkendara kepada pengguna jalan. Langkah-langkah ini diambil untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan kesadaran berkendara di wilayah tersebut.

Patroli dialogis dilakukan di Kecamatan Baso pada tahun 2023, yakni sebanyak 4 kali perbulan. Di Kecamatan Baso, masalah utama yang diangkat selama patroli dialogis adalah pencurian kecil dan gangguan keamanan di malam hari, yang membuat warga khawatir tentang keselamatan lingkungan mereka. Polres Agam membentuk satgas keamanan lokal yang melibatkan warga untuk berpatroli di malam hari bersama petugas kepolisian. Selain itu, patroli malam ditingkatkan untuk mencegah kejadian pencurian di lingkungan perumahan.

Patroli dialogis yang dilakukan oleh Polres Agam tersebut bertujuan untuk Menciptakan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat, Mengumpulkan informasi langsung dari warga mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Mencegah tindak kejahatan dengan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan dialog, Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hukum, keamanan, dan prosedur pencegahan kejahatan.

Dalam teori politik kriminal, oleh Marc Ancel dapat memberikan perspektif yang kuat dalam menganalisis pelaksanaan patroli dialogis untuk mencegah tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Agam. Ancel mengembangkan teori politik kriminal sebagai kerangka kebijakan negara untuk menangani kejahatan secara komprehensif dan preventif. Teori ini memandang bahwa strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya melalui penegakan hukum represif, tetapi lebih penting lagi melalui pendekatan preventif yang melibatkan peran aktif masyarakat.¹⁰

Pelaksanaan patroli dialogis sejalan dengan prinsip dasar teori Ancel karena bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan cara membangun hubungan yang lebih dekat antara aparat keamanan dan masyarakat. Patroli dialogis memungkinkan aparat keamanan untuk berinteraksi langsung dengan warga, menciptakan komunikasi dua arah, dan mendeteksi potensi ancaman sejak dini. Hal ini sesuai dengan pandangan Ancel bahwa pencegahan kejahatan yang efektif perlu dilakukan melalui pendekatan yang humanis dan dialogis, bukan hanya tindakan hukum yang keras.

Dalam konsep politik kriminal Ancel, intervensi preventif seperti patroli dialogis termasuk dalam strategi non-penal, yaitu upaya pencegahan yang tidak langsung melibatkan penghukuman. Ancel menekankan bahwa strategi politik kriminal yang ideal adalah yang mampu mencegah kejahatan tanpa harus menggunakan tindakan hukum yang represif, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan, yang merupakan inti dari politik kriminal preventif.¹¹

Patroli dialogis yang diterapkan di Kabupaten Agam dapat dipandang sebagai contoh implementasi politik kriminal yang progresif sesuai dengan teori Ancel. Pendekatan dialogis memperkuat integrasi sosial, mengurangi ketegangan antara aparat dan masyarakat, dan memungkinkan aparat untuk memahami kondisi sosial masyarakat yang mungkin menjadi faktor pemicu kejahatan.¹² Dengan demikian, teori politik kriminal Ancel memberikan dasar teoretis yang kuat, karena mendukung pentingnya strategi pencegahan yang humanis dan kolaboratif dalam menjaga keamanan.

Sat samapta Polres Agam melaksanakan patroli dialogis dengan beberapa metode yang efektif, antara lain Interaksi Langsung Anggota Sat samapta mendatangi warga secara langsung di tempat-tempat umum, seperti pasar, kawasan perumahan, terminal, hingga daerah yang rawan kejahatan. Petugas mengadakan percakapan dan sosialisasi mengenai situasi keamanan serta memberi imbauan.

Polres Agam melalui Sat samapta juga rutin mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda untuk membangun kerja sama yang baik dalam menciptakan lingkungan yang aman. Sat samapta Polres Agam juga mengadakan penyuluhan keliling di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Sasaran utama dari patroli dialogis meliputi Warga Masyarakat Umum Memberikan imbauan terkait Kamtibmas dan edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Pelajar dan Pemuda Mengarahkan mereka agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tawuran. Pedagang dan Pengusaha Mendorong mereka untuk turut serta menjaga keamanan di wilayah perdagangan, serta menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti penjualan barang ilegal. Komunitas Khusus Termasuk komunitas ojek, nelayan, hingga pekerja pasar, yang sering kali berinteraksi di tempat-tempat yang rawan tindak kejahatan.

Dalam patroli dialogis, Sat samapta Polres Agam juga menggunakan beberapa taktik pencegahan yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat Melalui patroli dialogis, masyarakat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit.*, hlm 38

¹¹ *Ibid.*,

¹² Wawancara dengan Personil Sat Samapta Polres Agam pada 2 Oktober 2024

diajak untuk lebih aktif dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta didorong untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Sosialisasi Protokol Keamanan Masyarakat diberi panduan dan informasi tentang cara menjaga keamanan rumah, lingkungan, serta tindakan cepat dalam menghadapi potensi kejahatan. Dengan pelaksanaan patroli dialogis, Polres Agam melalui Sat samapta berharap dapat Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian, Menurunkan tingkat kriminalitas melalui upaya pencegahan sejak dini, Membangun hubungan kerjasama yang solid antara masyarakat dan polisi dalam menjaga keamanan bersama dan Memberikan rasa aman di wilayah hukum Polres Agam.

Untuk meningkatkan respon positif dari masyarakat, Polres Agam melalui Sat samapta dapat melakukan beberapa hal seperti Mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara lebih terstruktur, baik melalui forum-forum masyarakat maupun melalui media sosial, agar masyarakat lebih memahami tujuan dan manfaat dari patroli dialogis. Sat samapta harus terus mengedepankan pendekatan yang ramah dan humanis agar masyarakat merasa dihargai dan didengarkan. Penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikasi yang terbuka sangat penting. Menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh masyarakat selama patroli dengan cepat dan tanggap akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap efektivitas polisi.

Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kabupaten Agam

Efektivitas pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Agam dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Milton Friedman. Teori ini menekankan pentingnya tiga komponen utama dalam sistem hukum yang saling terkait: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹³

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan kebijakan yang mendasari pelaksanaan patroli dialogis. Dalam konteks ini, aturan yang mendukung patroli dialogis harus memadai dan jelas, agar aparat keamanan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tugasnya. Substansi hukum yang mendukung juga memastikan bahwa patroli dialogis berfungsi sesuai dengan tujuan preventifnya, yakni mencegah tindak pidana melalui interaksi yang baik dengan masyarakat. Ketika aturan hukum ini diterapkan dengan tepat, maka akan memperkuat posisi aparat dalam menjalankan patroli dialogis secara efektif.

Selanjutnya, Struktur hukum mencakup lembaga, organisasi, dan perangkat hukum yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan patroli dialogis, seperti kepolisian, perangkat keamanan wilayah, dan tim patroli. Friedman berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas struktur ini, termasuk kesiapan sumber daya, jumlah personel yang memadai, pelatihan yang relevan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Jika struktur hukum ini berjalan dengan baik, patroli dialogis bisa berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga mencegah tindak pidana dengan lebih optimal. Budaya hukum, Budaya hukum adalah elemen penting yang meliputi nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat keamanan. Efektivitas patroli dialogis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan dari masyarakat, yaitu apakah masyarakat mempercayai aparat keamanan, merasa nyaman dalam berinteraksi dengan mereka, dan mau berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Ketika masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Agam memiliki budaya hukum yang positif, aparat keamanan lebih mudah menjalin dialog, dan masyarakat cenderung lebih aktif melaporkan potensi tindak pidana. Hal ini akan memperkuat pencegahan kejahatan melalui patroli dialogis.

¹³ Wa Ode Darmiati Indah, *Pengaruh Substansi, Kultur, Dan Struktur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Penegakan Hukum Sebagai Variabel Moderasi*, Tesis, Program Magister ilmu hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 202.

Dengan menghubungkan ketiga elemen ini, teori Friedman membantu mengidentifikasi faktor-faktor penentu efektivitas patroli dialogis. Efektivitas patroli dialogis dalam mencegah tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Agam dapat diukur melalui beberapa indikator. Salah satu indikator utama keberhasilan patroli dialogis adalah penurunan angka kejahatan. Berdasarkan data dari Polres Agam, setelah intensifikasi patroli dialogis di beberapa wilayah rawan, terjadi penurunan signifikan dalam jenis tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan, perkelahian antar pemuda, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi secara reguler dan komunikasi yang baik dengan warga membantu mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Patroli dialogis berhasil memperbaiki hubungan antara masyarakat dan polisi. Di Kabupaten Agam, patroli ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika warga merasa lebih nyaman untuk melapor dan berdialog dengan polisi, mereka lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait potensi ancaman atau kejahatan di sekitar mereka.

Polres Agam juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum. Kerja sama ini penting, terutama dalam menangani masalah ketertiban yang terkait dengan peraturan daerah, seperti masalah pedagang kaki lima, parkir liar, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Tokoh-tokoh masyarakat dan agama sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi dan sikap warga. Polres Agam mengajak para tokoh ini untuk aktif dalam patroli dialogis, misalnya dengan memberikan ceramah atau imbauan di tempat-tempat ibadah mengenai pentingnya menjaga keamanan dan kerukunan di masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan efektivitas patroli dialogis adalah sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Polres Agam melakukan berbagai kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan kejahatan, di antaranya Masyarakat diberi pemahaman tentang hukum dan dampak dari pelanggaran hukum, baik dalam bentuk seminar, dialog kelompok, maupun kunjungan ke sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kejahatan dengan meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat. Sat samapta juga rutin memberikan penyuluhan terkait bahaya narkoba, terutama di kalangan generasi muda, yang menjadi sasaran rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Melalui patroli dialogis, Sat samapta menyebarluaskan informasi tentang cara-cara menjaga keamanan lingkungan, seperti pentingnya pemasangan penerangan jalan, sistem ronda malam (Siskamling), hingga metode pelaporan cepat jika terjadi potensi kejahatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Agam dilakukan dengan mendengarkan langsung keluhan dan masalah yang dihadapi warga, seperti ketidakamanan, kemacetan, atau konflik antarwarga. Polisi mencari solusi yang tepat bersama masyarakat. Keterlibatan aktif dalam dialog, masyarakat akan merasa bahwa kepolisian bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberi layanan. Setiap keluhan yang diterima dicatat dan dianalisis lebih lanjut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan yang diperlukan. Informasi ini juga bisa digunakan sebagai bahan dalam melakukan patroli berikutnya atau sebagai laporan untuk pemerintah daerah jika perlu ada kebijakan tambahan. Patroli dialogis oleh Polres Agam, adalah pendekatan preventif dan proaktif yang berfokus pada interaksi langsung antara polisi dan masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Agam dapat diukur dengan indikator seberapa besar dukungan dari masyarakat, yaitu apakah masyarakat mempercayai aparat keamanan, merasa nyaman dalam berinteraksi dengan mereka, dan mau berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Berdasarkan data dari Polres Agam, setelah intensifikasi patroli dialogis di

beberapa wilayah rawan, terjadi penurunan signifikan dalam jenis tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan, perkelahian antar pemuda, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi secara reguler dan komunikasi yang baik dengan warga membantu mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Patroli dialogis berhasil memperbaiki hubungan antara masyarakat dan polisi. Di Kabupaten Agam, patroli ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika warga merasa lebih nyaman untuk melapor dan berdialog dengan polisi, mereka lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait potensi ancaman atau kejahatan di sekitar mereka.

REFERENSI

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adisasmita Raharjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Jakarta, 1996.
- H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016.
- Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Latsbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Wa Ode Darmiati Indah, *Pengaruh Substansi, Kultur, Dan Struktur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Penegakan Hukum Sebagai*